

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Achmad Rubaie. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007)
- Andrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- _____, *Sertifikat Hak atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Bernad Limbong, *hukum agraria nasional*, (Jakarta: Margareta Pustaka, 2012)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djembatan, 2002)
- _____, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti 2013)
- _____, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2002)
- Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Eddy OS, *et.al, Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012)
- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014)
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), hal.11.
- Irawan Soerodjo, *Hak Pengelolaan Atas Tanah*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama 2014), hal.53.
- _____, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Indonesia*, (Surabaya: Arloka Surabaya, 2003)
- Jimmy Joses Sembiring, *Paduan Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta: Visi Media, 2010)
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015)

- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Parlindungan, *Tanya Jawab Hukum Agraria Dan Pertanahan*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju. 2003), hal.28.
- Philiphus M. Hadjon, *et.al*, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016)
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Salim HS, *et.al*. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- _____, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Cetakan ke 2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hal.113.
- Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)
- Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: kencana, 2010)
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006)
- _____, *et.al*. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hal.29.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Cet. I Sinar Grafika Offset, 2010)
- Standar Operasional Prosedur (SOP) , *Penulisan Tugas Akhir Tesis Universitas Pelita Harapan*, (Jakarta: Fakultas Hukum UPH, 2022), hal.39
- Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999)
- _____, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2020)
- _____, *Pokok – pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT.Intermasa, 2007)

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006)

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermassa, 2020)

Urip Santoso, *Hukum Agraria Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2007), hal.125.

Waskito, Hadi arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia* , (Jakarta: Prenademia Group, 2019)

Yudhi Setiawan, *Hukum Pertanahan Teori Dan Praktik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hal.33

JURNAL

Desy Nurkristia “Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertifikat Hak atas Tanah”. *Jurnal Suara Hukum*, *Jurnal Suara Hukum*, Vol.3, No. 2,September 2021. DOI: <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p251-273>.

GN. Sugangga, “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Hukum Pertanahan Adat di Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah (Studi Kasus Penentuan Hak Tanah Timbul)”, *Masalah-masalah Hukum UDIP*, Vol. 31, No. 2 April-Juni, 2002. DOI:

Hartana, Kadek Diah Karuni , “Kajian keabsahan jual beli tanah yang belum bersertifikat dan akibat hukumnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 3 September, 2022. DOI: P-ISSN:2599-2694/O-ISSN:2599-2686

Hayati, ”Peralhian Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah”, *Jurnal Hukum*, Vol.13, No.3 Desember 2016. DOI: ISSN : 1858-0262 ISSN : 2528-3251

Klaudius Ilkam Hulu. “Kekuatan alat bukti sertipikat hak milik atas tanah dalam bukti kepemilikan hak”, Vol.1,No.1, Februari-Juli 2021. DOI: ISSN: 2775-3166.

Putri Gracia Lempoy, “Kajian Hukum Hak atas Tanah tanpa sertifikat yang diduduki seseorang menurut pasal 1963 Kuhperdata”, *Jurnal Lex Crimen* Vol.6, No.2 Maret- April 2017. DOI: <https://media.neliti.com/media/publications/148931-ID-kajian-hukum-hak-atas-tanah-tanpa-sertif.pdf>.

Renhat Malianus Siki, I Gusti Nyoman Agung, dan I Nyoman Darmadha, 2014, “Kelayakan Saksi Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah”, Kertha Semaya, Vol. 02, No. 02, Oktober, 2014.

Tri wahyu surya lestari, “Komparasi Syarat Kebasahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Syariah”, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Vol. 8, No. 2, Desember 2017. DOI: 1907-7262/e-ISSN: 2477-5339.

HASIL PENELITIAN:

Alvionita Winda Aswari , “Akibat Hukum Akta Jual Beli Tanpa Sertipikat Tanah Hak Milik” Skripsi, Makasar : Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa , 2022.

Fitriani Dwi Nurhayati, “Perlindungan Hukum Bagi Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 286/Pdt.G/2012 2014” Tesis, Yogyakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

